



PENGEMBANG PROPERTI PANIK, GUBERNUR TERBITKAN SE PENGHENTIAN SEMENTARA IZIN PERUMAHAN

INDRAMAYU — H Yogi Kurniawan ST mendapat perhatian dari Radar Cirebon. Dia secara mendapatkan penghargaan Person of The Year 2025 versi Radar Cirebon kategori Penggerak Ekonomi Daerah, Kamis (18/12). Penghargaan tersebut diberikan di Studio Kaliandra RCTV, Jl. Perjuangan No 9 Kota Cirebon.

Sebagai CEO Landgroup.id Indramayu, dia menyebut bahwa pengembang properti di Jawa Barat dibuat panik setelah Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat, tertanggal 13 Desember 2025.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan rumah/perumahan di seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini menuai beragam respons. Mulai dari pengembang yang

terkejut, hingga konsumen yang merasa khawatir.

Dalam surat edaran tersebut, Dedi menegaskan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi tidak hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi hampir merata di seluruh Jawa Barat. Potensi bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor, dinilai semakin meningkat akibat tekanan pembangunan dan perubahan fungsi lahan.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga masing-masing kabupaten/kota menyelesaikan kajian risiko bencana serta melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Radar Indramayu melakukan wawancara dengan salah satu pengembang properti di Indramayu. Yakni, Landgroup.id, untuk mengetahui dampak dari diterbitkannya surat edaran tersebut.

Yogi selaku CEO Landgroup.id menjelaskan bahwa para pelaku

usaha properti tentu merasa kaget dan panik. Khususnya terhadap proses perizinan yang sudah berjalan. Ia menyampaikan bahwa Landgroup.id, yang tergabung dalam asosiasi HIMPERA dan REI, telah menyampaikan aspirasi secara kolektif melalui asosiasi tersebut. Selanjutnya, asosiasi akan mengirimkan surat resmi kepada kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pada prinsipnya, kami sebagai pelaku usaha akan tunduk pada regulasi yang ditetapkan pemerintah. Proses penerbitan izin perumahan sendiri sebenarnya telah melalui mekanisme teknis yang komprehensif. Mulai dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Teknis BPN, rekomendasi peil banjir, Andalalin, UKL/UPL, alih fungsi lahan (jika ada), pengesahan *site plan*, rekomendasi TPU, hingga bermuara pada penerbitan PBG,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa setiap tahapan perizinan, dilakukan melalui kajian

teknis dari berbagai disiplin ilmu. “*Insya Allah*, jika seluruh kajian tersebut dilaksanakan secara komprehensif sesuai aturan, dan rekomendasinya dijalankan oleh pelaku usaha, maka keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dapat terjaga,” tegasnya.

Mas Yogi berharap, moratorium yang dimaksud hanya berlaku bagi proses perizinan yang benar-benar baru dan belum berjalan sama sekali. Sementara itu, proses perizinan yang sudah berjalan diharapkan tetap dapat dilanjutkan. Mengingat, adanya investasi besar yang telah dikeluarkan oleh investor serta keterkaitan dengan fasilitas pembiayaan KPR/KYG dari perbankan BUMN. Sekaligus untuk mendukung program pemerintah 3 juta rumah.

“Baru kemarin kami tancap gas mendukung program 3 juta rumah, tiba-tiba harus menarik rem tangan akibat surat edaran ini. Bisa dibayangkan kepanikan yang terjadi di sektor properti,” pungkasnya. (dun)



PENGHARGAAN: GM Radar Indramayu Adun Sastra SH (kanan) MH menyerahkan penghargaan Person of The Year 2025 kepada CEO Landgroup.id Indramayu, H Yogi Kurniawan ST, Kamis (18/12).

